Jurnal Pustaka Dianmas, Vol 6, No. 1 (Juni 2026), Hal. 71-80
DOI: doi.org/10.32509/dianmas.v6i1.7600

Pemberdayaan KPM PKH melalui Pendidikan dan Pengaturan Ekonomi Keluarga

Warsidi, Airlangga Surya Kusuma*, Faizi, Jubei Levianto, Abdul Aji Kresna Tri Anggara

UPN Veteran Jakarta
Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta 12450

*Email Korespondensi: airlanggasuryak@upnvj.ac.id

Abstract - *Beneficiaries of the Family Hope Program (PKH) require practical empowerment not only in receiving social assistance, but also in transforming the assistance into better family welfare through education-oriented priorities and household economic management. This community engagement program aimed to strengthen the understanding of PKH beneficiary families in Tanjungbaru Village, Cikarang Timur, Bekasi, regarding education planning, income and expense recording, monthly budgeting, debt control, and emergency fund preparation. The activity was conducted offline on 17 April 2026 and involved 23 PKH beneficiaries. The method consisted of preparation and coordination, a pre-test, interactive socialization, discussion of household financial cases, and a post-test. The results showed an increase in participants' average score from 1.93 in the pre-test to 3.96 in the post-test, or an average improvement of 2.03 points. The most visible improvements occurred in participants' understanding of education fund planning, debt management, emergency funds, and business capital planning. These findings indicate that structured and contextual financial education can improve the capacity of PKH beneficiary families to regulate household expenditure, prioritize children's education, and reduce the risk of unproductive debt. Sustainable mentoring involving PKH facilitators and local community actors is recommended to ensure behavioral changes and long-term welfare improvement.*
Keywords: *PKH Beneficiaries; Family Empowerment; Education; Economic Management; Family Welfare*

Abstrak - Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) memerlukan pemberdayaan praktis agar bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi juga menjadi pintu masuk peningkatan kesejahteraan melalui prioritas pendidikan keluarga dan pengaturan ekonomi rumah tangga. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan memperkuat pemahaman KPM PKH di Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, mengenai perencanaan pendidikan anak, pencatatan pendapatan dan pengeluaran, penyusunan anggaran bulanan, pengendalian utang, serta penyiapan dana darurat. Kegiatan dilaksanakan secara luring pada 17 April 2026 dengan melibatkan 23 KPM PKH. Metode kegiatan meliputi persiapan dan koordinasi, pre-test, sosialisasi interaktif, diskusi kasus keuangan keluarga, dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan skor rata-rata peserta dari 1,93 pada pre-test menjadi 3,96 pada post-test, atau meningkat rata-rata 2,03 poin. Peningkatan pemahaman terutama tampak pada aspek perencanaan dana pendidikan, manajemen utang, dana darurat, dan rencana modal usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan keuangan yang sederhana, kontekstual, dan dekat dengan pengalaman sehari-hari KPM PKH dapat meningkatkan kapasitas keluarga dalam mengatur pengeluaran, memprioritaskan pendidikan anak, dan mengurangi risiko utang konsumtif. Pendampingan berkelanjutan bersama pendamping PKH dan aktor lokal disarankan agar perubahan pemahaman dapat berkembang menjadi perubahan perilaku ekonomi keluarga.
Kata Kunci: KPM PKH; Pemberdayaan Keluarga; Pendidikan; Pengaturan Ekonomi; Kesejahteraan Keluarga

ISSN 2798-057X (Online)
Submitted: 06-30-2026, Accepted: 07-14-2026, Published: 07-14-2026
CC BY-NC-SA 4.0. Copyright © [2026] The Author(s).

PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu instrumen perlindungan sosial yang diarahkan untuk membantu keluarga miskin dan rentan agar memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sebagai bantuan sosial bersyarat, PKH tidak hanya dimaknai sebagai transfer bantuan, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan yang mendorong keluarga penerima manfaat untuk memperbaiki kualitas hidup secara bertahap. Dalam konteks ini, keberhasilan PKH tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya bantuan yang diterima, melainkan juga oleh kemampuan keluarga dalam mengelola bantuan tersebut untuk kebutuhan prioritas, khususnya pendidikan anak dan stabilitas ekonomi rumah tangga (Permensos Nomor 1 Tahun 2018, 2018; Putri et al., 2023; Wahyuni et al., 2024).

KPM PKH umumnya menghadapi keterbatasan dalam pengaturan ekonomi keluarga. Keterbatasan tersebut dapat terlihat dari belum tertibnya pencatatan pendapatan dan pengeluaran, belum adanya anggaran bulanan, belum optimalnya perencanaan biaya pendidikan anak, serta masih adanya risiko penggunaan utang konsumtif untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Kondisi ini menjadi tantangan karena bantuan sosial yang diterima secara periodik berpotensi cepat habis apabila tidak dikelola berdasarkan skala prioritas. Oleh sebab itu, pemberdayaan KPM PKH perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan praktis dalam mengambil keputusan ekonomi keluarga yang sederhana, realistis, dan berkelanjutan (Ariani et al., 2024; Yushita, 2017).

Pentingnya literasi dan pengaturan ekonomi keluarga semakin relevan ketika melihat kondisi literasi keuangan masyarakat Indonesia. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan penduduk Indonesia berada pada angka 65,43%, sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02% (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Data tersebut menunjukkan adanya kemajuan, tetapi juga menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku keuangan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama kepada kelompok masyarakat rentan dan keluarga berpendapatan rendah (Nadia et al., 2024; Suman et al., 2024).

Pendidikan dalam konteks ini dimaknai dalam dua arah. Pertama, pendidikan sebagai proses edukasi bagi KPM PKH agar memahami cara mengatur ekonomi keluarga. Kedua, pendidikan sebagai prioritas penggunaan sumber daya keluarga, terutama untuk mendukung keberlanjutan sekolah anak. Pada keluarga rentan, keputusan ekonomi sehari-hari sering kali berhubungan langsung dengan keberlanjutan pendidikan anak, misalnya kemampuan membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, kebutuhan gizi anak sekolah, dan kesiapan menghadapi pengeluaran mendadak. Dengan demikian, pengaturan ekonomi keluarga yang baik dapat menjadi faktor pendukung bagi tercapainya tujuan PKH dalam meningkatkan akses dan kualitas hidup keluarga (Noval et al., 2024; Soegoto et al., 2020).

Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi menjadi lokasi kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kecamatan Cikarang Timur merupakan wilayah yang berkembang dan beririsan dengan dinamika ekonomi kawasan industri Kabupaten Bekasi. Namun demikian, keberadaan aktivitas ekonomi wilayah tidak secara otomatis menghilangkan kerentanan ekonomi keluarga. KPM PKH tetap memerlukan pendampingan agar mampu mengatur bantuan, pendapatan, dan pengeluaran secara lebih bijak. Berdasarkan kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memberikan pendidikan dan pendampingan awal tentang pengaturan ekonomi keluarga bagi KPM PKH (Badan Pusat Statistik, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman KPM PKH mengenai pendidikan dan pengaturan ekonomi keluarga

sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan. Fokus kegiatan meliputi pencatatan pendapatan, perhitungan pengeluaran rutin, penyusunan anggaran bulanan, manajemen utang, persiapan dana darurat, dan perencanaan dana pendidikan anak. Artikel ini menyajikan proses pelaksanaan kegiatan, hasil evaluasi pre-test dan post-test, serta pembahasan mengenai kontribusi kegiatan terhadap penguatan kapasitas KPM PKH.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif. Pendekatan edukatif diterapkan melalui penyampaian materi yang sederhana, bertahap, dan sesuai dengan pengalaman keseharian KPM PKH. Pendekatan partisipatif dilakukan melalui diskusi interaktif, tanya jawab, dan pemecahan masalah berdasarkan contoh kasus keuangan keluarga. Dengan pendekatan ini, peserta tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi juga diajak untuk mengaitkan materi dengan kondisi ekonomi rumah tangga masing-masing (Marta et al., 2025; Nilamsari et al., 2024).

Mitra kegiatan adalah 23 orang warga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan dilaksanakan secara luring di salah satu rumah warga pada Jumat, 17 April 2026, pukul 12.00-14.15 WIB. Tim pengabdian berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, yaitu Warsidi, Airlangga Surya Kusuma, Faizi, Jubei Levianto, dan Abdul Aji Kresna Tri Anggara.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test. Pre-test diberikan sebelum penyampaian materi untuk mengetahui pemahaman awal peserta. Post-test diberikan setelah penyuluhan dan diskusi untuk mengetahui perubahan pemahaman peserta. Instrumen evaluasi memuat pertanyaan seputar anggaran bulanan, dana darurat, perbedaan kebutuhan dan keinginan, manajemen utang, investasi sederhana, dana pendidikan anak, rencana modal usaha, identifikasi sumber pendapatan dan pengeluaran, serta pemanfaatan hasil usaha atau pendapatan keluarga (Fahlevi et al., 2021; Sungkono et al., 2022).

Tabel 1. Tahapan dan Indikator Kegiatan Pengabdian

Tahap	Aktivitas Utama	Indikator Keberhasilan
Persiapan	Koordinasi tim pengabdi, identifikasi kebutuhan peserta, penyusunan materi dan instrumen pre-test/post-test.	Materi dan instrumen evaluasi tersedia serta sesuai dengan kebutuhan KPM PKH.
Pre-test	Pengukuran pemahaman awal peserta terkait pendidikan keluarga dan pengaturan ekonomi rumah tangga.	Tersedia skor awal peserta pada setiap indikator pertanyaan.
Sosialisasi interaktif	Penyampaian materi pencatatan pendapatan, pengeluaran, anggaran, utang, dana darurat, dan dana pendidikan anak.	Peserta aktif mengikuti materi, bertanya, dan memberikan contoh kasus keuangan keluarga.
Diskusi dan simulasi	Pembahasan contoh pengaturan uang bantuan, prioritas pendidikan anak, dan pengendalian utang konsumtif.	Peserta mampu mengidentifikasi kebutuhan prioritas dan risiko pengeluaran tidak produktif.
Post-test dan evaluasi	Pengukuran ulang pemahaman peserta setelah kegiatan.	Terjadi peningkatan skor rata-rata pemahaman peserta dibandingkan pre-test.



Gambar 1: Alur Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian
(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2026)

HASIL PENEMUAN DAN DISKUSI

Profil Kegiatan dan Peserta

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan secara luring dengan suasana informal agar peserta lebih nyaman menyampaikan pengalaman dan permasalahan keuangan keluarga. Kegiatan diawali dengan sambutan tokoh setempat, dilanjutkan pre-test, pemaparan materi, diskusi interaktif, dan post-test. Format kegiatan yang sederhana dan dekat dengan kehidupan peserta membantu proses pembelajaran menjadi lebih mudah diterima oleh KPM PKH.

Peserta kegiatan merupakan KPM PKH yang memiliki kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola bantuan sosial dan pendapatan keluarga. Secara umum, diskusi menunjukkan bahwa sebagian peserta telah memahami pentingnya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi belum semuanya memiliki kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin. Beberapa peserta juga menyampaikan tantangan dalam membedakan kebutuhan dan keinginan, terutama ketika menghadapi pengeluaran mendadak, kebutuhan sekolah anak, atau tekanan sosial untuk memenuhi konsumsi tertentu.



Gambar 2: Kegiatan Edukasi Pengaturan Ekonomi Keluarga bagi KPM PKH
(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2026)

Materi Pemberdayaan dalam Pendidikan dan Pengaturan Ekonomi

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, materi pemberdayaan tidak hanya diarahkan pada peningkatan literasi keuangan secara umum, tetapi juga difokuskan pada penguatan kapasitas keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengelola pendidikan keluarga dan ekonomi rumah tangga. Hal ini penting karena KPM PKH tidak hanya membutuhkan bantuan sosial sebagai dukungan konsumsi jangka pendek, tetapi juga pendampingan pengetahuan agar bantuan yang diterima dapat digunakan secara lebih produktif, terencana, dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga.

Materi pertama disampaikan oleh Warsidi dan Abdul Aji Kresna Tri Anggara adalah **pendidikan keluarga**, khususnya mengenai peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Peserta diberikan pemahaman bahwa keberhasilan pendidikan anak tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga pada perhatian, kebiasaan, dan dukungan keluarga di rumah. Orang tua perlu membangun kebiasaan belajar, mengawasi kehadiran anak di sekolah, menyediakan waktu untuk mendampingi anak, serta menanamkan motivasi bahwa pendidikan merupakan jalan penting untuk memperbaiki kualitas hidup keluarga di masa depan. Dalam konteks KPM PKH, pendidikan anak menjadi aspek strategis karena salah satu tujuan PKH adalah mendorong akses anak terhadap layanan pendidikan secara berkelanjutan.

Materi kedua disampaikan oleh Airlangga Surya Kusuma dan Faizi berkaitan dengan **perencanaan dana pendidikan anak**. Peserta diberikan pemahaman bahwa biaya pendidikan tidak hanya mencakup uang sekolah, tetapi juga kebutuhan lain seperti seragam, alat tulis, transportasi, buku, kegiatan sekolah, dan biaya tidak terduga. Oleh karena itu, keluarga perlu mulai menyisihkan sebagian pendapatan atau bantuan sosial untuk kebutuhan pendidikan anak secara

rutin, meskipun dalam jumlah kecil. Perencanaan dana pendidikan dapat dilakukan dengan membuat catatan kebutuhan sekolah, memperkirakan biaya bulanan dan tahunan, serta memprioritaskan pengeluaran pendidikan dibandingkan pengeluaran konsumtif yang kurang mendesak.

Selanjutnya, materi ketiga yagn diarahkan oleh Jubei Levianto pada **pengaturan ekonomi rumah tangga**. Peserta diajak untuk memahami pentingnya mencatat seluruh sumber pendapatan keluarga, baik dari bantuan sosial PKH, pekerjaan harian, usaha kecil, maupun pendapatan anggota keluarga lainnya. Setelah itu, peserta diarahkan untuk mencatat pengeluaran rumah tangga, membedakan kebutuhan pokok dan keinginan, serta menyusun anggaran sederhana. Pengaturan ekonomi rumah tangga ini bertujuan agar keluarga mampu mengetahui kondisi keuangannya secara lebih jelas, menghindari pemborosan, dan mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan prioritas seperti pangan, pendidikan, kesehatan, tabungan, dan kebutuhan darurat.

Materi berikutnya adalah **manajemen utang**. Dalam diskusi dengan peserta, dijelaskan bahwa utang dapat menjadi beban apabila digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan tidak disertai kemampuan membayar. Peserta diberikan pemahaman untuk menghindari pinjaman berbunga tinggi, pinjaman konsumtif, maupun ketergantungan pada rentenir. Keluarga juga didorong untuk menghitung kemampuan membayar sebelum berutang, mendahulukan pelunasan utang yang paling mendesak, serta tidak menggunakan bantuan sosial hanya untuk menutup utang konsumtif. Dengan manajemen utang yang lebih bijak, KPM PKH diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi keluarga dan mengurangi risiko tekanan keuangan.

Selain itu, peserta juga diberikan edukasi mengenai **pentingnya dana darurat**. Dana darurat merupakan simpanan yang disiapkan untuk menghadapi kejadian tidak terduga, seperti anggota keluarga sakit, kehilangan pekerjaan, kebutuhan sekolah mendadak, atau kerusakan alat kerja. Bagi keluarga penerima manfaat PKH, dana darurat tidak harus dimulai dalam jumlah besar, tetapi dapat dibangun secara bertahap melalui kebiasaan menyisihkan uang harian atau mingguan. Pemahaman ini penting agar keluarga tidak selalu bergantung pada pinjaman ketika menghadapi kebutuhan mendesak.

Secara keseluruhan, kegiatan pemberdayaan ini menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan KPM PKH tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diterima, tetapi juga oleh kemampuan keluarga dalam mengelola bantuan, pendapatan, pengeluaran, pendidikan anak, utang, dan tabungan darurat. Melalui edukasi yang diberikan, peserta diharapkan mampu membangun perilaku ekonomi rumah tangga yang lebih terencana, mendukung keberlanjutan pendidikan anak, mengurangi ketergantungan pada utang, serta meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Perubahan Pemahaman Peserta

Peningkatan pemahaman peserta diukur melalui perbandingan skor pre-test dan post-test. Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh indikator mengalami peningkatan setelah kegiatan sosialisasi dan diskusi interaktif. Skor rata-rata keseluruhan meningkat dari 1,93 menjadi 3,96 atau naik sebesar 2,03 poin. Peningkatan ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta dan relevan dengan kebutuhan pengaturan ekonomi keluarga KPM PKH.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Pre-Test dan Post-Test Peserta

No.	Indikator Pertanyaan	Pre-test	Post-test	Perubahan
1	Pemahaman peserta tentang peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak	1,91	3,83	1,92
2	Pemahaman peserta tentang pentingnya menyisihkan dana untuk kebutuhan pendidikan anak	2,35	4,35	2,00
3	Kemampuan peserta membedakan kebutuhan pokok keluarga, kebutuhan pendidikan, dan keinginan konsumtif	2,26	4,30	2,04
4	Pemahaman peserta tentang cara mengelola utang agar tidak mengganggu kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak	1,17	3,38	2,21
5	Pemahaman peserta tentang penggunaan bantuan PKH untuk kebutuhan prioritas keluarga	1,78	3,78	2,00
6	Kemampuan peserta merencanakan dana pendidikan anak secara bertahap dan berkelanjutan	2,26	4,43	2,17
7	Pemahaman peserta tentang pengaturan ekonomi rumah tangga melalui pencatatan pendapatan dan pengeluaran	1,43	3,70	2,27
8	Kemampuan peserta mengidentifikasi sumber pendapatan keluarga dan alokasi pengeluaran yang mendukung kesejahteraan	2,30	4,13	1,83
9	Kemampuan peserta menghitung pendapatan, pengeluaran, sisa uang, dan prioritas belanja keluarga	2,04	3,91	1,87
10	Pemahaman peserta tentang pentingnya dana darurat untuk menghadapi kebutuhan mendadak keluarga	1,76	3,76	2,00
Rata-rata	**Rata-rata keseluruhan indikator**	**1,93**	**3,96**	**2,03**

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 2, seluruh indikator menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan. Indikator yang digunakan tidak hanya mengukur literasi keuangan secara umum, tetapi diarahkan secara khusus pada kebutuhan KPM PKH, yaitu pendidikan keluarga, perencanaan dana pendidikan anak, pengaturan ekonomi rumah tangga, manajemen utang, dana darurat, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Peningkatan rata-rata skor dari **1,93 pada pre-test** menjadi **3,96 pada post-test** menunjukkan bahwa kegiatan edukasi mampu meningkatkan pemahaman peserta sebesar **2,03 poin**. Hal ini memperlihatkan bahwa materi yang diberikan relevan dengan kondisi KPM PKH, terutama dalam membantu keluarga mengatur bantuan sosial dan pendapatan rumah tangga agar lebih terarah pada kebutuhan prioritas.

Indikator dengan peningkatan tertinggi terdapat pada kemampuan peserta dalam melakukan pengaturan ekonomi rumah tangga melalui pencatatan pendapatan dan pengeluaran, yaitu sebesar **2,27 poin**. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum kegiatan, peserta belum terbiasa mencatat kondisi keuangan keluarga secara sederhana. Setelah kegiatan, peserta mulai memahami bahwa pencatatan pendapatan dan pengeluaran dapat membantu keluarga mengetahui kemampuan ekonomi, mengurangi pemborosan, dan menentukan prioritas kebutuhan.

Peningkatan juga terlihat pada indikator perencanaan dana pendidikan anak, yaitu sebesar **2,17 poin**. Temuan ini menunjukkan bahwa peserta mulai memahami pentingnya menyiapkan biaya pendidikan secara bertahap, seperti kebutuhan alat tulis, seragam, transportasi, dan biaya

sekolah lainnya. Dalam konteks KPM PKH, pemahaman ini penting karena pendidikan anak merupakan salah satu jalan utama untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam jangka panjang.

Selain itu, indikator manajemen utang meningkat sebesar **2,21 poin**. Hal ini menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman lebih baik mengenai risiko utang konsumtif dan pentingnya mengelola pinjaman agar tidak mengganggu kebutuhan dasar keluarga maupun pendidikan anak. Dengan pemahaman tersebut, KPM PKH diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan dan tidak bergantung pada pinjaman berbunga tinggi.

Implikasi terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan sosial yang diterima, tetapi juga oleh kemampuan keluarga dalam mengelola bantuan, pendapatan, pengeluaran, dan kebutuhan prioritas secara bijak. Dalam konteks ini, pemberdayaan melalui pendidikan keluarga dan pengaturan ekonomi rumah tangga menjadi penting karena dapat membantu keluarga membangun kebiasaan dasar dalam merencanakan kebutuhan, mencatat keuangan, mengatur prioritas, mengendalikan utang, serta menyiapkan dana untuk kebutuhan pendidikan anak dan keadaan darurat (Permensos Nomor 1 Tahun 2018, 2018; Soegoto et al., 2020).

Pendidikan keluarga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan KPM PKH karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk kebiasaan, sikap, dan orientasi masa depan anak. Melalui kegiatan ini, peserta diarahkan untuk memahami bahwa pendidikan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif dari orang tua. Dukungan tersebut dapat berupa perhatian terhadap kehadiran anak di sekolah, penyediaan perlengkapan belajar, pengawasan kebiasaan belajar di rumah, serta perencanaan dana pendidikan secara bertahap. Dengan demikian, bantuan sosial dan pendapatan keluarga dapat diarahkan tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi harian, tetapi juga untuk investasi sosial jangka panjang melalui pendidikan anak (Putri et al., 2023; Suman et al., 2024).

Dari aspek ekonomi rumah tangga, kegiatan ini memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya mencatat pendapatan dan pengeluaran keluarga, membedakan kebutuhan pokok dan keinginan konsumtif, serta menyusun anggaran sederhana. Kebiasaan ini penting agar KPM PKH memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan keluarga. Dengan pencatatan sederhana, keluarga dapat mengetahui sumber pendapatan, pola pengeluaran, sisa uang yang tersedia, serta kebutuhan yang harus diprioritaskan, termasuk kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan anak, pembayaran utang, tabungan, dan dana darurat (Noval et al., 2024; Soegoto et al., 2020).

Dalam jangka pendek, kegiatan ini berdampak pada peningkatan pemahaman peserta mengenai pendidikan keluarga dan pengaturan ekonomi rumah tangga. Peningkatan tersebut terlihat dari hasil evaluasi pre-test dan post-test yang menunjukkan kenaikan skor rata-rata dari 1,93 menjadi 3,96 atau meningkat sebesar 2,03 poin. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang diberikan cukup relevan dengan kebutuhan peserta, khususnya dalam memahami perencanaan dana pendidikan anak, pengelolaan anggaran keluarga, manajemen utang, dan pentingnya dana darurat (Sungkono et al., 2022; Yushita, 2017).

Dalam jangka menengah, peningkatan pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku ekonomi keluarga. Perubahan perilaku yang diharapkan antara lain mulai mencatat pendapatan dan pengeluaran secara rutin, menyisihkan sebagian pendapatan untuk

kebutuhan pendidikan anak, mengurangi pengeluaran konsumtif, lebih berhati-hati dalam berutang, serta mulai membangun dana darurat meskipun dalam jumlah kecil. Perubahan-perubahan sederhana ini dapat menjadi dasar bagi terbentuknya ketahanan ekonomi keluarga (Ariani et al., 2024; Fahlevi et al., 2021).

Dalam jangka panjang, pemberdayaan KPM PKH melalui pendidikan keluarga dan pengaturan ekonomi rumah tangga diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. Keluarga yang mampu mengelola keuangan dengan baik akan lebih siap menghadapi kebutuhan mendadak, mengurangi ketergantungan pada pinjaman konsumtif, serta memiliki peluang lebih besar untuk mendukung keberlanjutan pendidikan anak. Dengan demikian, program pemberdayaan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan, tetapi juga pada penguatan fungsi keluarga sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan (Noval et al., 2024; Soegoto et al., 2020).

Namun demikian, kegiatan satu kali belum cukup untuk memastikan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan lanjutan melalui modul pencatatan keuangan keluarga sederhana, simulasi penyusunan anggaran bulanan, pemantauan alokasi dana pendidikan anak, serta pertemuan berkala dengan pendamping PKH dan tokoh masyarakat setempat. Pendampingan yang konsisten akan membantu peserta mengubah pengetahuan menjadi kebiasaan ekonomi keluarga yang lebih terencana, mandiri, dan berkelanjutan (Permensos Nomor 1 Tahun 2018, 2018; Putri et al., 2023).

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat bertema pemberdayaan KPM PKH dalam pendidikan keluarga dan pengaturan ekonomi rumah tangga di Desa Tanjungbaru berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengelolaan ekonomi keluarga. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan skor rata-rata dari 1,93 menjadi 3,96 atau meningkat sebesar 2,03 poin. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh indikator, terutama pada aspek perencanaan dana pendidikan anak, pengaturan ekonomi rumah tangga, manajemen utang, dana darurat, dan pemanfaatan bantuan sosial untuk kebutuhan prioritas keluarga.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi yang sederhana, kontekstual, dan dekat dengan pengalaman sehari-hari peserta dapat membantu KPM PKH memahami cara mengelola bantuan sosial dan pendapatan keluarga secara lebih bijak. Pendidikan keluarga menjadi aspek penting karena kesejahteraan keluarga tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi saat ini, tetapi juga dengan kemampuan keluarga dalam mendukung pendidikan anak sebagai investasi jangka panjang.

Pengaturan ekonomi rumah tangga yang baik menjadi salah satu prasyarat penting agar bantuan PKH dapat memberikan dampak yang lebih optimal. Melalui pencatatan keuangan, penyusunan anggaran, pengendalian utang, penyisihan dana darurat, dan perencanaan dana pendidikan anak, KPM PKH diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga serta mengurangi ketergantungan pada pinjaman konsumtif. Meski demikian, hasil kegiatan ini terutama menunjukkan peningkatan pemahaman, sehingga diperlukan pendampingan lanjutan untuk memastikan perubahan perilaku ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ariani, K. F., Rahmawati, T. I., & Anggraini, D. V. (2024). Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Pedesaan Guna Mendorong Tingkat Inklusi Keuangan Indonesia Perspektif Hukum Perbankan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, *1*(6), 118–128.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Kecamatan Cikarang Timur Dalam Angka 2025*.

Fahlevi, M., Yusnaidi, & Irmalis, A. (2021). Strategi Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Bagi Masyarakat Agraris Di Kawasan Pedesaan. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, *5*(2), 182–190.

Marta, R. F., Ulung, A. K., Siregar, S. R. H., Rifandi, T., Agustinus, F., Dewis, M., Fadhilla, D. N., Mochammad, Z. A., & Muthmainah, S. S. (2025). Alih Pengetahuan Komunikasi Lingkungan Berbasis Sanitasi dan Higienitas Produksi bagi Pelaku UMKM Pulau Panggang. *Jurnal Pustaka Dianmas*, *5*(2), 129–141. https://journal.moestopo.ac.id/index.php/dianmas

Nadia, S., Zulkarnain, Z., & Faradilla, C. (2024). Analisis Literasi Keuangan Petani Padi Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, *9*(4), 61–73. https://doi.org/10.17969/jimfp.v9i4.32208

Noval, N. P., Suriansyah, A., Harsono, A. M. B., Ferdiyansyah, A., & Prihandoko, Y. (2024). Implementasi Pembiasaan Menabung Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, *01*(03), 90–94.

Nilamsari, N., Liana, C., & Sanjaya, M. (2024). Sosialisasi Penguatan Komunikasi Keluarga Menghadapi Problem Tawuran dan Kesehatan Jiwa Bagi Perangkat Kelurahan Cililitan Jakarta Timur. *Jurnal Pustaka Dianmas*, *4*(1), 1–8.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *SP OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024*.

Permensos Nomor 1 Tahun 2018 (2018).

Putri, A. F., Putri, S., Azzahra, F. R., Hasyim, M. G., & Hamdan, A. (2023). Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga Melalui Program P2WKSS. *Jurnal Obor Penmas: Pendidikan Luar Sekolah*, *6*(2), 74–83.

Soegoto, A. S., Lintong, D. N., Mintalangi, S., & Soeikromo, D. (2020). Meningkatkan Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat LPIP UMP*, *4*(1), 141–148.

Suman, A., Supriani, I., & Nurrachman, Y. R. (2024). Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Desa Dalam Mencapai Ekonomi Inklusif Menuju Kesejahteraan Masyarakat. *J-Abdimas*, *11*(1), 112–117.

Sungkono, N., Santoso, Y. P., & Arief, M. (2022). Komunikasi Sosial Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Pustaka Dianmas*, *2*(1), 14–19.

Wahyuni, S. F., Lestari, S. P., & Lestari, S. S. I. (2024). Keterkaitan antara Literasi Keuangan dan Pendapatan Pada Kesejahteraan Keuangan : Mediasi Prilaku Keuangan Generasi Sandwich. *Bursa: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *3*(1), 30–43.

Yushita, A. N. (2017). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi. *Jurnal Nominal*, *6*(1), 11–26.